

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah tertuju pada peningkatan pendapatan perkapita dan juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan adanya perubahan di segala elemen, baik di segi infrastruktur, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tercipta sebuah lapangan kerja guna meminimalisir masalah-masalah pembangunan ekonomi itu sendiri dengan salah satu tujuannya yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat .

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sendiri sangat erat kaitannya. Dengan adanya pembangunan ekonomi nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat terjadi lebih cepat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar jalannya pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah (Fahmi, 2015).

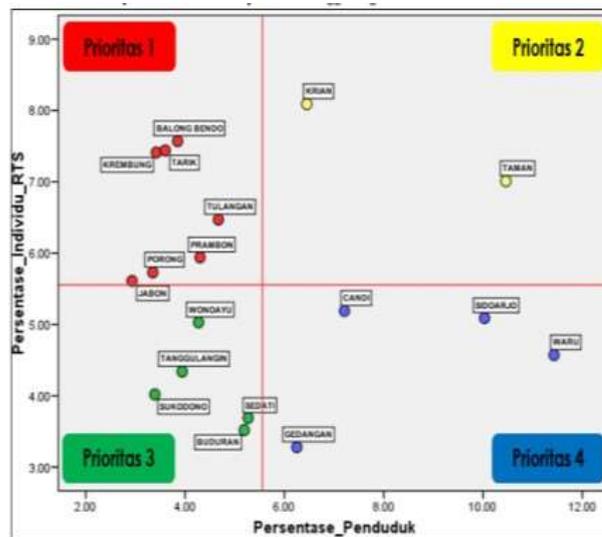
Dalam pengaplikasiannya dibutuhkan kesinambungan dengan perencanaan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu perekonomian yang stabil. Selain itu, dapat dikatakan juga sebagai perubahan multidimensional karena juga dapat menjadi alat untuk menanggulangi kemiskinan.

Kemiskinan menjadi salah satu perhatian yang besar untuk negara-negara di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga ini menjadi salah satu fokus bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang tinggi, terutama di wilayah pedesaan yang tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan

juga untuk wilayah perkotaan seperti ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Persoalan kemiskinan ini dapat dipicu oleh berbagai macam hal, seperti upah minimum kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, kualitas hidup manusia yang kurang, jumlah penduduk miskin yang bertambah banyak setiap tahunnya, dan juga tingkat pengangguran yang masih terbilang tinggi. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang serba kekurangan. Kondisi serba kekurangan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam BPS (2020) dikatakan bahwa Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-16 pada ukuran tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia dengan persentase 10,37% di tahun 2019. Dimana itu berarti kemiskinan Jawa Timur tersebut berada di atas persentase kemiskinan nasional yang sebesar 9,41%.

Urgensitas kemiskinan di Sidoarjo tergambar dalam isu strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo dari tahun ke tahun (Bappeda Sidoarjo 2010-2021). Penanggulangan kemiskinan masih menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah, tak terkecuali pemerintah Sidoarjo sendiri. Menurut BPS Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya, seperti Batu, Malang, Madiun, dan Surabaya. Meskipun dapat terlihat pada grafik 1.1 bahwa pergerakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo relatif menurun, namun masih ada 5 kecamatan yang masih berada di zona merah atau masih berada dibawah garis kemiskinan.

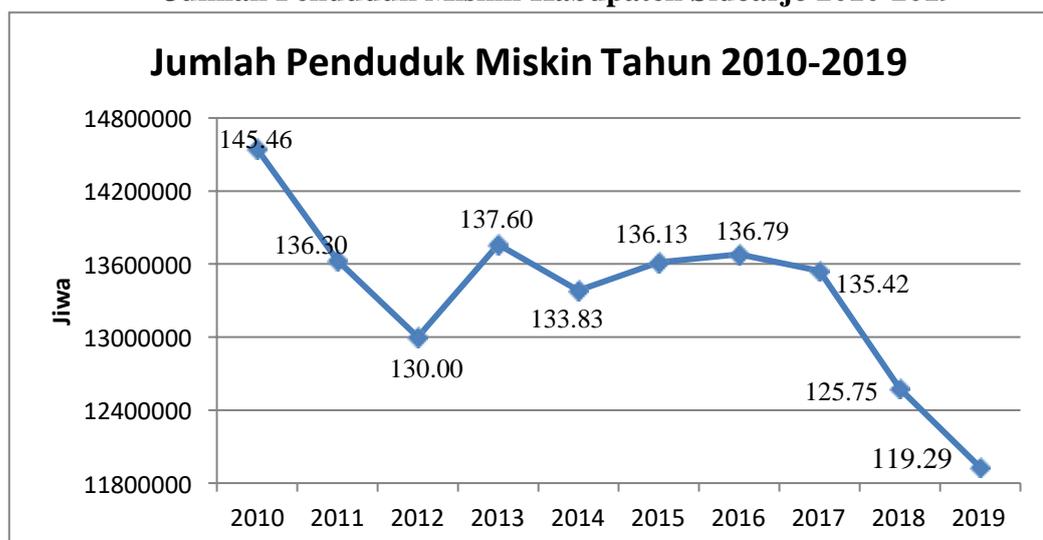
Gambar 1.2
Prioritas 1 Wilayah Intervensi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan



Sumber : Kustanto, 2015

Terdapat tujuh kecamatan yang termasuk kedalam prioritas 1 wilayah intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Ketujuh kecamatan ini yaitu kecamatan Balongbendo, Tarik, Krembung, Tulangan, Prambon, Porong, dan Jabon.

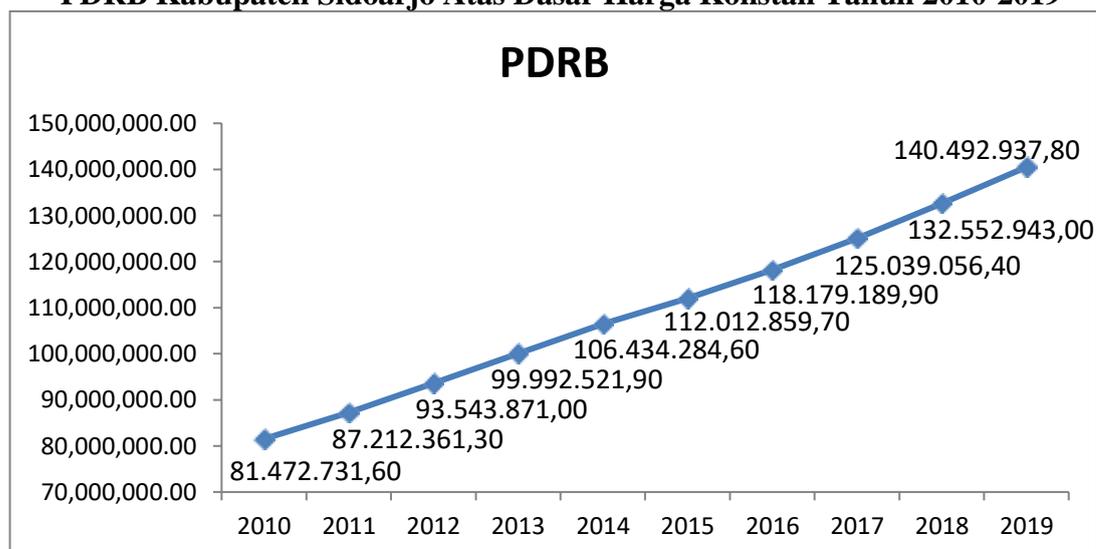
Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo 2010-2019



Sumber : diolah, BPS (2021)

Pada Grafik 1.1 dapat terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi. Terjadi peningkatan penduduk miskin di tahun 2013 sebesar 76.0 jiwa atau 0.27% dari tahun sebelumnya yang sebesar 130.00 jiwa dan juga pada tahun 2015 sebesar 23.0 jiwa atau 0.04% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh peningkatan harga bahan pokok yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak pada saat itu. Namun di tahun-tahun berikutnya persentase penduduk miskin cenderung mengalami tren menurun, ini disebabkan karena pemerintah Sidoarjo telah menerapkan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah menerapkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang nantinya diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan juga menaikkan taraf hidup masyarakat Sidoarjo.

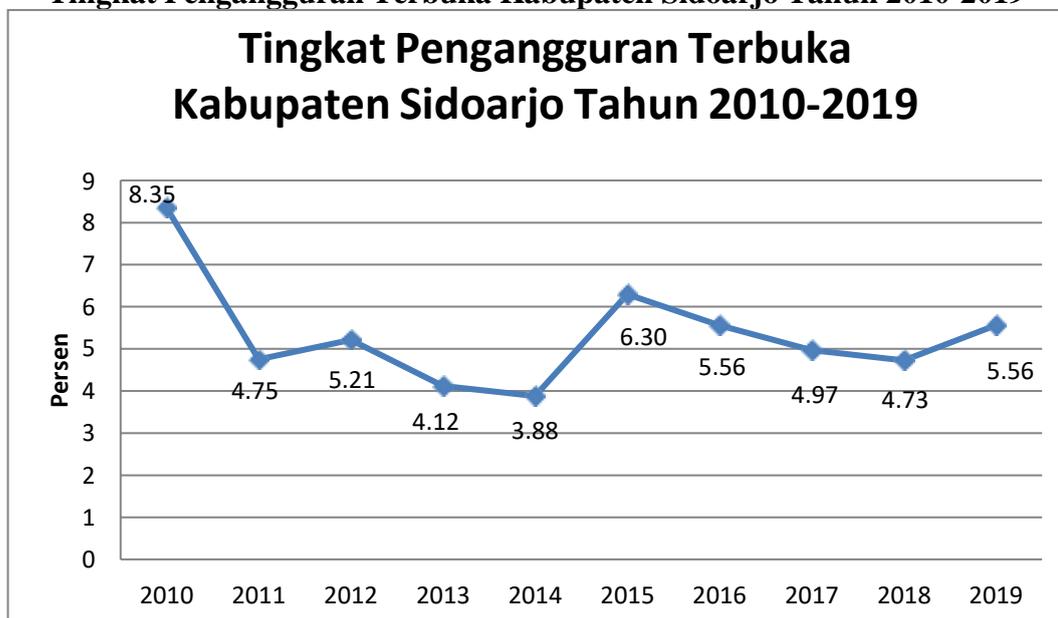
Grafik 1.2
PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2019



Sumber : diolah, BPS (2021b)

Selain menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, pertumbuhan daerah juga merupakan syarat yang cukup penting dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi ini sendiri tercermin dari peningkatan PDRB setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai 2019 PDRB Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PDRB yang signifikan terlihat di tahun 2011 menuju 2012, dimana kenaikan tersebut sebesar Rp 6.331.509,70. lalu peningkatan yang cukup signifikan juga terlihat di tahun 2018 menuju 2019, dimana kenaikan tersebut sebesar Rp 7,939.994,80. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, PDRB dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk menekan angka kemiskinan dengan menggunakan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat.

Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2019



Sumber : diolah, Badan Pusat Statistik, 2019

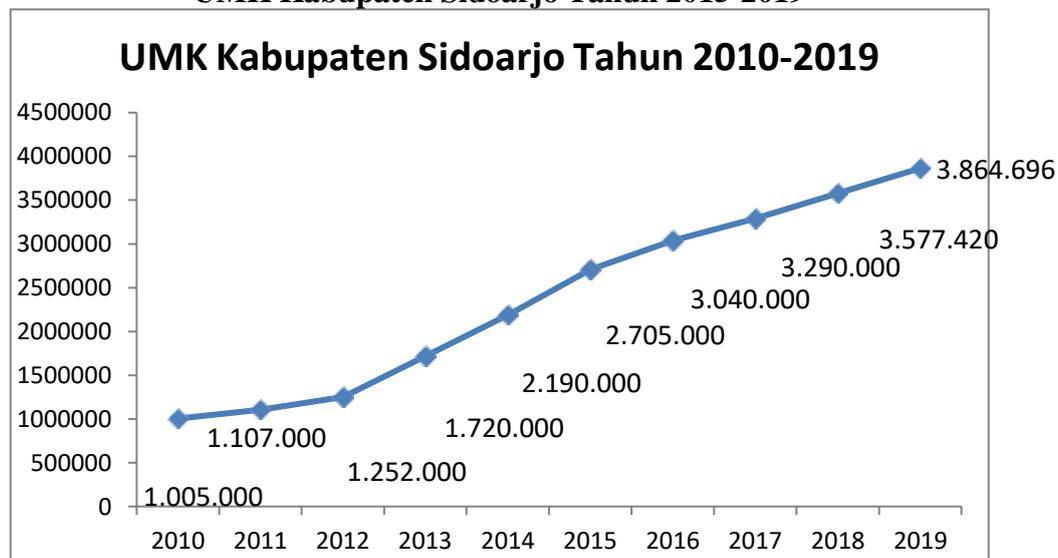
Poin lainnya yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) yaitu masalah pengangguran. Pengangguran sendiri

merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, pada 2011 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.048.577 jiwa, dimana prosentase pengangguran terbuka sebesar 4.75% atau bisa dikatakan menurun secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 8.35%. Hal ini dikarenakan tersedianya fasilitas *job fair* dan juga mulai diberlakukannya pelatihan kewirausahaan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tingkat pengangguran ini berhubungan erat dengan kemiskinan. Dalam hasil penelitian dari Ardi Anindita (2017) dikatakan bahwa meningkatnya jumlah pengangguran yang terjadi akan berdampak terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan pula. Dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan tersebut, pemerintah diharapkan dapat lebih mengerucutkan kebijakan pada penambahan peluang kerja untuk angkatan kerja guna memaksimalkan penyerapan angkatan kerja.

Faktor lainnya yang tidak kalah penting yaitu pengupahan. Upah menjadi salah satu peranan penting bagi para pekerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Grafik 1.4

UMK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2019

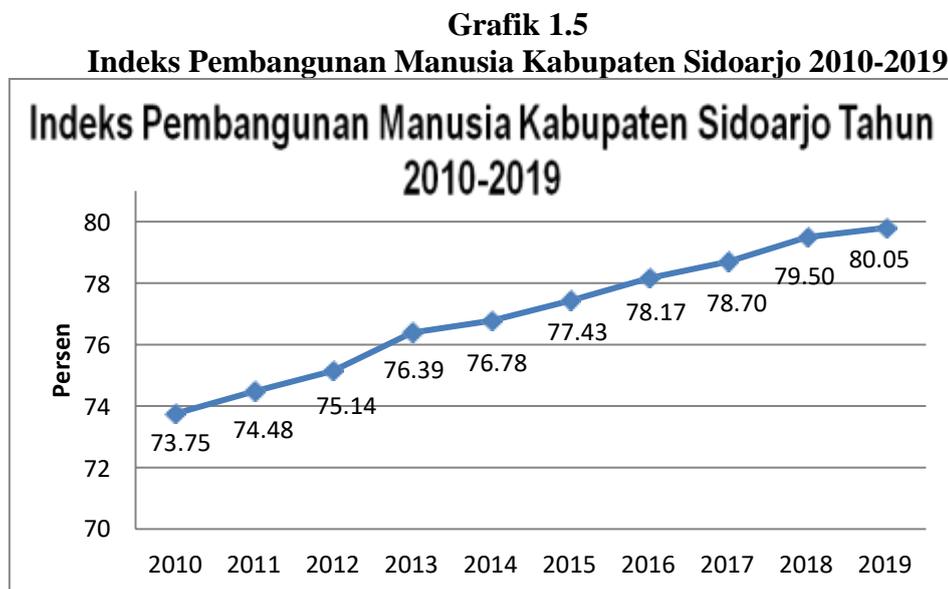


Sumber : diolah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tentang Upah Minimum, 2010-2019

Pemerintah terlibat dalam menangani masalah pengupahan lewat berbagai kebijakan yang telah dibuat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2016 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 3.040.000 atau 12,38% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 2.705.000. Dan di tahun selanjutnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, hasil penelitian dari A Kurniawati (2017) menunjukkan bahwa UMK berdampak signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan dari UMK itu akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan yaitu tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin rendah tingkat indeks pembangunan manusia, maka semakin rendah pula produktivitas kerja masyarakat. Jika produktivitas kerja masyarakat menjadi rendah, maka ini berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan. Dengan rendahnya tingkat

pendapatan, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang akan terjadi (Sekar Ayu, 2018).



Sumber : diolah, Badan Pusat Statistik, 2018 dan Supriyatno, 2021

Dari data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 indeks pembangunan manusia sebesar 77.43%, ditahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 78.17%. Indeks pembangunan manusia tersebut terus meningkat hingga tahun 2019 dengan kenaikan tertinggi berada di tahun 2012 dengan kenaikan 1.25% dari tahun sebelumnya yang sebesar 0.66%. Adanya hubungan yang signifikan antara IPM dan kemiskinan ini disebabkan karena jika IPM meningkat maka kualitas hidup atau standar hidup masyarakat juga meningkat. Apabila kualitas hidup masyarakat meningkat maka tingkat kemiskinan akan cenderung menurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik memilih judul ini karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan, akan tetapi penurunannya belum signifikan. Disamping itu, peneliti juga tertarik untuk membahas permasalahan kemiskinan di kawasan

industri, terkhusus di Kabupaten Sidoarjo ini sendiri. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo agar dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah Upah Minimum Kabupsten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini terdiri dari data *time-series* pada periode tahun 2010 hingga 2019 di Kabupaten Sidoarjo.
2. Penelitian ini menggunakan variabel jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen dan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi agar dapat menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.
2. Bagi instansi pemerintahan, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan guna mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bagi UPN Veteran Jawa Timur, sebagai tambahan literatur penelitian untuk perpustakaan di UPN Veteran Jawa Timur.